

Gempa Merusak Ancam Indonesia **13 ZONA MEGATRUST** **295 SESAR AKTIF** **9 KM 'MONSTER GEMPA'**

BERIKUT ADALAH 6 SESAR AKTIF YANG ADA DI INDONESIA SERTA LOKASINYA

1. Sesar Semangko Sesar Semangko atau Sesar Sumatera adalah patahan yang memotong pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Lokasi Sesar Semangko membentang di sepanjang sisi barat Pulau Sumatera sepanjang 1.900 kilometer. Sesar Semangko teridentifikasi sebagai jenis sesar mendatar.
2. Sesar Mentawai Sesar Mentawai adalah sesar aktif yang berlokasi di laut sekitar kepulauan Mentawai berjarak sekitar 150 kilometer dari pantai barat Sumatera. Sesar Mentawai memanjang dari pulau-pulau Mentawai dari Selatan hingga ke hingga ke sekitar Utara Nias. Sesar Mentawai teridentifikasi sebagai jenis sesar naik.
3. Sesar Cimandiri Sesar Cimandiri adalah sesar aktif sepanjang 100 kilometer yang membentang dari Padalarang hingga Pelabuhan Ratu. Zona sesar Cimandiri terdiri dari banyak sekali sesar naik dan sesar mendatar dengan arah orientasi barat-timur dan timur laut-barat daya. Sesar Cimandiri teridentifikasi sebagai jenis sesar geser.
4. Sesar Lembang Sesar Lembang adalah sesar aktif di utara Kota Bandung yang memanjang dari barat ke timur. Sesar ini merupakan terusan dari ujung utara Sesar Cimandiri. Sesar Lembang teridentifikasi sebagai jenis sesar naik.
5. Sesar Baribis Sesar Baribis adalah sesar aktif yang membentang dari Kabupaten Purwakarta sampai perbukitan Baribis di Kabupaten Majalengka. Struktur Sesar Baribis diperkirakan memiliki panjang sekitar 100 kilometer. Sesar Baribis teridentifikasi sebagai jenis sesar naik.
6. Sesar Semarang adalah sesar yang berarah utara-selatan yang sejajar dengan Kaligarang, sehingga juga dikenal sebagai Sesar Kaligarang. Sesar Semarang membentang dari daerah Gajahmungkur di utara sampai daerah Gunung Swakul di selatan.

Foto Istimewa



Data statistik menunjukkan aktivitas kegempaan di wilayah Indonesia memiliki tren meningkat. Bukan hanya gempa dengan beragam kekuatan dan kedalaman yang meningkat, tapi juga jumlah gempa-gempa yang bersifat merusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan ada 'Monster Gempa'. Ditemukan area seluas kurang lebih 9 kilometer di sepanjang zona patahan baru Sesar Cugenang. Setelah dideteksi menjadi pemicu gempa Cianjur Magnitudo 5.6 pada 21 November 2022 lalu, kini sedikitnya 9 desa yang dilewati dipastikan dalam zona berbahaya dan didorong untuk segera dilakukan relokasi. Temuan ini menambah 'tanda' bahaya dari alam Indonesia yang memiliki 13 zona megatruster serta 295 sesar aktif. Walhasil, jika dulu tiap tahun terjadi 8-10 kali gempa merusak, sekarang, sejak 2018, bisa terjadi 15-20 kali gempa merusak dalam setahun. Mitigasi dan literasi bencana tampaknya tak bisa ditawar lagi.

(Baca Hal 11)

Government (Ha.2)
Tiba-tiba KPK
Ungkap Kendala
Penyelidikan Dugaan
Korupsi Formula E,
Apa Saja?

Tiba-tiba KPK Ungkap Kendala Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E, Apa Saja?



Rangkaian balapan Formula E Jakarta 2022 sudah digelar 3- 4 Juni lalu, sayangnya kegiatan yang berlangsung di DKI Jakarta ini menyisakan dugaan korupsi. (Foto-dok)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kendala dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Salah satunya ialah meminta dokumen maupun keterangan dari pihak Formula E Operation (FEO).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya masih di tahap penyelidikan dalam dugaan kasus korupsi Formula E, dan belum bisa meminta bantuan serious fraud office (SFO) Inggris. Ini karena kedudukan FEO untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi. Menurut Alexander, bahwa dalam tahap penyelidikan, pemanggilan para calon saksi yang akan dimintai keterangan masih bersifat sukarela.

Menurutnya, jika calon saksi tersebut tidak datang, KPK juga tidak bisa berbuat banyak. "Jadi, dalam tahap penyelidikan, kami memanggil calon saksi. Jika calon saksi itu sifatnya masih 'volunteer' sebetulnya. Apalagi jika pihak swasta tidak datang, kami juga tidak bisa apa-apa. Itu lah kesulitan-kesulitan kami di tingkat penyelidikan," ujar Alex, dikutip Minggu (11/12/2022).

Selain itu, kendala lainnya di tingkat penyelidikan dugaan korupsi Formula E ini, adalah terkait dengan pengeledahan. Menurut Alexander, pihaknya bahkan tidak bisa melakukan pengeledahan di Jakpro.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, penyelidikan kasus Formula E masih berjalan sampai saat ini. "Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ekspose yang lalu oleh Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) bahwa penyelidikan Formula E tetap jalan tidak pernah

terganggu," Firli saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). Ia mengatakan, bahwa prinsip kerja KPK tidak akan pernah terpengaruh dengan kekuasaan manapun, termasuk dalam menyelidiki dugaan korupsi Formula E itu.

KPK mulai menaruh perhatian terhadap Formula E sejak akhir Oktober 2021. Saat itu mereka memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ahmad Firdaus untuk menanyakan soal penyelenggaraan balapan tersebut. Bahkan saat itu, Fraksi PDI-P dan PSI sudah meminta hak interpelelasi untuk menuntut penjelasan Anies. Dalam studi kelayakan, total keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020 sampai 2024 diperkirakan mencapai Rp 3,12 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan finansial Jakpro Rp 544 miliar dan dampak ekonomi sebesar Rp 2,58 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan studi kelayakan ulang. Pasalnya, dalam studi awal tidak ada komponen komitmen yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta setiap tahunnya.

APBD Rp 80 T Jakarta Disorot

Di sisi lain, KPK menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta tertinggi dengan nilai sekitar Rp 80 triliun. Menyoroti itu, KPK mendorong agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat DKI diperiksa.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mulanya menerangkan soal alur pemeriksaan LHKPN yang dilakukan oleh KPK. Ia mengaku KPK hanya memetakan instansi pemerintah yang memiliki potensi korupsi tinggi. "Di antara yang 300 ribu (LHKPN), kita bisa petakan instansi

mana yang lebih rawan, aparaturnya penegak hukum, Dirjen pajak, Dirjen Bea Cukai, kemudian BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang rawan pungli dan lain sebagainya," kata Alexander Marwata kepada wartawan, Minggu (11/12/2022).

Kemudian, dia menyinggung soal provinsi yang paling rawan peluang korupsinya, yakni DKI Jakarta dengan anggaran APBD sebesar Rp 80 triliun. Dia mendorong untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat Pemprov DKI yang masuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. "DKI anggarannya kan Rp 80 triliun APBD-nya. Kita dorong, 'tolong dong liatin tuh LHKPN yang bersangkutan, minta laporan ke perbankan kalo yang bersangkutan melampirkan surat kuasa,'" jelas Alex.

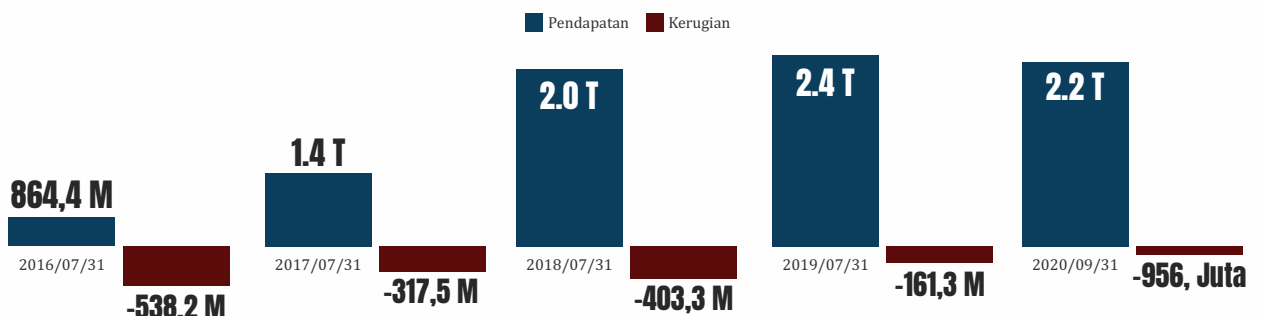
Kemudian, Alex meminta agar pejabat itu dilaporkan ke atasannya bila tidak menyertakan surat kuasa dalam pelaporan tersebut. Lalu KPK akan mengkategorikan pejabat tersebut tidak melaporkan dan meminta agar diberikan sanksi.

"Kalo yang bersangkutan nggak melampirkan surat kuasa, kita sampaikan ke atasan langsung. 'LHKPN yang bersangkutan kita nyatakan belum lengkap dan kategorikan belum lengkap,' supaya ada sanksi," tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Alex juga meminta agar para lembaga pemerintah dan instansi untuk membuat aturan internal agar para pejabat wajib lapor menyampaikan aset yang dimilikinya. Tak tanggung-tanggung, dia meminta agar para pejabat yang bandel tak diberi kenaikan pangkat hingga dicopot.

"Makanya kami sampaikan, mestinya secara internal itu dijadikan semacam standar, standar perilaku. Buat pejabat yang tidak lapor LHKPN ya jangan dipromosikan, jangan dinaikkan pangkatnya," ucap Alex. "Kalau yang sudah punya jabatan tetapi tidak lapor, padahal wajib lapor, copot jabatannya," tambahnya. (wid,rls,ist,ant/dya)

PENDAPATAN DAN KERUGIAN FORMULA E OPERATIONS LTD (2016-2020)



Sumber: Formula E Operations Ltd

Ramai-ramai Tarik Setoran Awal Haji, DPR Ungkap Pemicu Sulitnya Penambahan Kuota

JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) mengakui ada masyarakat di beberapa wilayah melakukan penarikan setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp25 juta. Penarikan tersebut dengan dalih antrean sangat lama hingga uang digunakan untuk menunaikan umrah.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengaku terus berupaya mendorong penambahan kuota jamaah haji. Diketahui, penyebab kuota jamaah haji di Indonesia setiap tahunnya sulit bertambah adalah karena kebijakan pembatasan oleh pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan tersebut menurut Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis akibat menimbang fasilitas dan infrastruktur yang ada di sana.



Pekerja menyulam kaligrafi Islam menggunakan benang perak murni atau benang perak berlapis emas pada tahap akhir pembuatan Kiswah Kabah. (Foto-dok)

5 NEGARA DENGAN KUOTA HAJI TERBANYAK DI DUNIA

1. INDONESIA
Negara Indonesia menempatkan posisi pertama dengan jumlah kuota haji terbanyak di dunia. Menteri Agama Republik Indonesia Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji kepada negara Indonesia sebanyak 100.051 untuk warga negara Indonesia. Indonesia yang memiliki jumlah warga negara yang beragama Islam terbanyak di Dunia, yakni sebesar 86,9% atau sebesar 237,56 juta jiwa dari total jumlah warga negara Indonesia. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bagi masyarakat Muslim di Indonesia untuk mulai mempersiapkan tabungan Haji guna ibadah ke baitullah.

2. PAKISTAN
Negara Pakistan menjadi urutan kedua negara dengan jumlah kuota haji terbanyak yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu sebesar 81.132 jamaah.

3. INDIA
Dirutkan ketiga, India menjadi negara dengan kuota haji terbanyak di Dunia. Sebagai negara dengan identitas keajaiban dunia "Masjid Taj Mahal", Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memberikan jatah kuota haji kepada India sebesar 79.237 jamaah.

4. BANGLADESH
Salah satu negara di Asia Selatan yang bernama Republik Rakyat Bangladesh menjadi urutan keempat sebagai negara dengan kuota haji terbanyak di Dunia, yaitu mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi sebesar 57.585 jamaah.

5. Nigeria
Negara yang terletak di benua Afrika bagian barat menjadi negara dengan jumlah kuota haji terbesar di Afrika, yaitu sebesar 43.008 jamaah.

Dalam pelaksanaan haji, antusias masyarakat Indonesia memang sangat tinggi, hanya saja pembatasan kuota menjadi kendala. Setiap tahunnya Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu jamaah dan untuk Sumatera Barat ber-kisar 4.500 jamaah.

"Kalau kami dari komisi VIII berharap sekali adanya penambahan kuota ini," ujar John Kenedy Azis di Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (11/12/2022).

Hanya saja pemerintah Indonesia selalu menghargai keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Baginya penambahan kuota sebanyak 10 hingga 15 ribu sangat dibutuhkan oleh jamaah Indonesia. Penambahan itu bisa mengurangi jumlah antrean jamaah yang melebihi persediaan kuota setiap tahunnya.

"Jadi para jamaah memang harus bersabar untuk penambahan kuota ini, kami akan berupaya untuk merealisasikannya," terangnya. Upaya itu kata John Kenedy Azis seperti mendorong pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan fasilitas yang ada. Sehingga kapasitasnya bisa lebih banyak menampung kuota.

Sementara itu, menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) besaran uang haji yang dikelola pihaknya per hari ini mencapai Rp169 triliun dan jumlahnya akan terus bertambah seiring semangat umat muslim Indonesia menunaikan rukun Islam tersebut.

"Uang tersebut diinvestasikan secara syariah, aman, dan penuh kehati-hatian. Kami selalu dikawal oleh Komisi VIII DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander di Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (11/12/2022).

Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Stakeholder Advisory Strategi

Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H di Pariaman.

Ia mengatakan karena pihaknya diawasi maka investasi yang dilakukan harus yang terbaik sehingga tidak saja aman namun juga memberikan nilai manfaat yang besar. Bahkan dengan nilai manfaat tersebut tidak saja dapat mensubsidi keberangkatan haji namun juga dapat membantu peningkatan pendidikan, agama dan kesehatan.

Dengan nilai manfaat itu pihaknya dapat mengurangi biaya akomodasi pelaksanaan haji dengan pembangunan rumah Indonesia di Makkah. Ia menyampaikan apresiasi calon jamaah haji di Indonesia yang terus mendaftar untuk keberangkatan haji meskipun saat ini dilanda pandemi COVID-19. "Per hari ini saja pendaftar haji sudah 290 ribu jamaah. Jadi jamaah haji optimis berangkat," ujarnya.

Alasan untuk Umrah

Sebelumnya, Kasubdit Pembinaan Jamaah Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, Khalilurrahman mengatakan penarikan setoran awal tidak seharusnya dilakukan oleh calon haji. Dia mengatakan, dengan bertambahnya calon jamaah haji justru akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji. "Di beberapa daerah da fenomena calon haji menarik dana setoran awal haji untuk umrah. Padahal apabila calon jamaah haji di Indonesia semakin banyak, akan bisa menambah jumlah kuota haji. Karena itu, calon haji sebaiknya tidak menarik dana haji," kata Khalil.

Dia mengatakan, apabila calon haji sakit atau meninggal dunia, maka bisa dilakukan pelimpahan porsi haji kepada ahli waris, yaitu ayah/ibu

kandung, saudara kandung dan anak kandung. "Dananya jangan ditarik, tapi dilimpahkan saja porsinya ke ahli warisnya," saran Khalil.

Pada acara ini, Khalil mengimbau kepada masyarakat untuk menanamkan niat haji dari sekarang. "Tanamkan niat sungguh-sungguh dan disertai ikhtiar maka akan terlaksana kita untuk ke tanah suci," kata Khalil dilanjutkan dengan memberikan doa untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Salah satu daerah yang warganya melakukan penarikan setoran awal haji adalah Sumenep, Jawa Timur. Karena terlalu lama daftar antrean haji hingga mencapai 34 tahun.

Hal itu disampaikan langsung Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep Choirony Hidayat bahwa penarikan atau pembatalan keberangkatan haji terjadi hampir setiap hari.

"Rata-rata setiap hari ada tiga hingga tujuh orang yang melakukan penarikan biaya haji untuk pembatalan keberangkatan," terang Choirony Hidayat saat dikonfirmasi pada Minggu (11/12/2022).

Selain karena terlalu lama daftar tunggu haji, sebagian besar membatalkan keberangkatan karena alasan usia yang mayoritas usianya di atas 50 tahun. Sehingga lanjutnya, mereka merasa tidak memungkinkan lagi untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah.

Namun alanjutnya, mereka yang menarik biaya haji itu memilih ibadah umrah. Pihaknya menyayangkan dengan adanya fenomena pembatalan haji yang merupakan rukun Islam bagi yang mampu tersebut. "Seharusnya yang mendaftar tidak membatalkannya, walaupun misalnya mau umrah. Silakan umrah tanpa menarik biaya haji," paparnya. Choirony Hidayat mengaku tetap meminimalkan adanya pembatalan bagi calon jamaah haji. (wid,rls,ant/dya)

KPK : Banyak Pejabat Kekayaannya Tak Wajar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) curiga banyak pejabat negara memiliki harta tidak wajar. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata setelah ditanya wartawan mengenai kekayaan bekas Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, yang tidak wajar.

Menurut Alex Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ferdy Sambo juga belum diumumkan dalam situs resmi KPK. Padahal aset dan kekayaan milik penyelenggara negara mudah dipantau. Alex menyebut bahwa kecurigaan tersebut tak hanya kepada Ferdy Sambo saja, melainkan pejabat-pejabat negara lain yang memiliki rumah-rumah besar.

"Kalau masalah kecurigaan sih enggak hanya yang bersangkutan (Ferdy Sambo), kan banyak pejabat negara juga yang punya kekayaan enggak wajar. Rumah di Pondok Indah itu punya siapa? Siapa saja pejabat punya rumah di situ?" kata Alex pada wartawan setelah acara Hari Antikorupsi Sedunia di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, di lansir dari tempo.co, Minggu (11/12/2022).

Alex mengatakan curiga terhadap harta kekayaan Ferdy Sambo. Meski begitu, memang banyak pejabat yang harta kekayaannya tidak wajar dan patut dicurigai. Alex juga meminta wartawan menelusuri para pemilik rumah-rumah besar di kawasan elite seperti Pondok Indah karena diduga ada yang dimiliki oleh pejabat negara. Hal itu lantaran besarnya gaji para pejabat negara tersebut jika dikalkulasikan dengan kekayaannya sungguh tidak wajar.

"Mestinya wartawan juga yang usut itu, rumah Pondok Indah itu punya siapa? Pejabat siapa saja punya rumah di situ? Kan gaji penghasilan pejabat negara, penyelenggara negara, semua terukur mulai dari pangkat terendah sampai kemudian pensiun," kata Alex. "Itu semua ada SK (Surat Keputusan)-nya, tunjangan, gaji pokok berapa dan sebagainya, tinggal diakumulasi saja kan kapan dia masuk kapan dia pensiun."

LHKPN Ferdy Sambo

Alex menyampaikan bahwa KPK belum mengumumkan LHKPN Sambo karena datanya belum lengkap. Sebab, menurutnya, eks Kadiv Propam Polri tersebut tak pernah melengkapi penyampaian LHKPN-nya. Ferdy Sambo juga tak melampirkan surat kuasa tersebut kepada KPK.

"Sebetulnya bukan belum terdaftar, tetapi yang bersangkutan belum menyampaikan surat kuasa, untuk melakukan klarifikasi," tutur Alex.

Alex menjelaskan bahwa selain menyampaikan aset yang dimiliki, para penyelenggara negara



Ilustrasi KPK

diwajibkan untuk menyertakan surat kuasa. Surat tersebut bertujuan untuk memberi izin kepada KPK dalam mengklarifikasikan penyampaian LHKPN, salah satunya memeriksa rekening bank.

"Selain menyampaikan laporan, yang bersangkutan harus sampaikan surat kuasa. Misalnya kami boleh meminta laporan rekening koran yang bersangkutan dan keluarganya ke bank, dalam rangka klarifikasi, yang bersangkutan tidak sampaikan itu," kata Alex.

Penyampaian hasil LHKPN ini, menurut Alex, wajib buat semua institusi. Termasuk dalam hal ini institusi Polri. Pelaporan wajib disampaikan kepada penyidik KPK. "(Polri) wajib. Semua penyidik, wajib," ujar Alexander Marwata.

Ini Instansi Paling Rawan Korupsi

Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap risiko terhadap instansi negara yang pejabatnya rawan terjerat tindak pidana korupsi. Menurut Alex, mitigasi terhadap risiko dugaan korupsi tersebut dilakukan KPK dengan melakukan pengecekan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di instansi tersebut.

"Kita petakan risiko-risiko instansi pemerintah yang tingkat korupsinya tinggi, kemudian kita lihat dari laporan LHKPN para pejabatnya, enggak semua kemudian kita periksa," ujar Alex saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, di lansir dari kompas.com, Minggu (11/12/2022).

"Ada 300.000 lebih penyelenggara

pejabat negara yang wajib lapor, tapi di antara 300.000 lebih itu kita petakan instansi mana sih yang paling rawan," ucapnya melanjutkan.

Alex menyatakan, aparat penegak hukum merupakan instansi yang rawan terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan data yang diperoleh KPK. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut masuk menjadi instansi yang rawan korupsi. "Aparat penegak hukum, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, BPN itu rawan pungli," papar Alex.

Tak hanya instansi pemerintah, KPK juga telah memetakan sejumlah daerah yang pejabatnya rawan terjerat tindak pidana rasuah. Menurut mantan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, korupsi rawan terjadi di daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya besar.

"Kalau provinsi, pejabat mana yang paling rawan, provinsi yang anggarannya gede dong, Provinsi DKI Jakarta, ya anggarannya kan Rp 80 triliun, APBD-nya," kata Alex. "Kita dorong itu, tolong dong liatin LHKPN-nya, minta laporan ke perbankan kalau yang bersangkutan melampirkan surat kuasa," ucap dia.

Menurut Alex, jika pejabat yang telah wajib lapor tidak juga memberikan surat kuasa kepada KPK untuk melihat transaksinya di perbankan, maka pihaknya akan melaporkan pejabat tersebut kepada atasan langsungnya. Sebab, jika laporan LHKPN tidak diklarifikasi dengan transaksi di perbankan

maka penyampaian LHKPN tersebut dianggap tidak lengkap. (lut/dya)



"Kalau masalah kecurigaan sih enggak hanya yang bersangkutan (Ferdy Sambo), kan banyak pejabat negara juga yang punya kekayaan enggak wajar. Rumah di Pondok Indah itu punya siapa? Siapa saja pejabat punya rumah di situ?"

ALEXANDER MARWATA
Wakil Ketua KPK



Skor Buruk Kebebasan Berekspresi 2022

JAKARTA - Catatan baru terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia menunjukkan skor buruk. Penyumbang catatan buruk indikator kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat diantaranya dari pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penindakan pasal karet dalam KUHP, hingga penindakan demonstrasi dalam KTT G20 di Bali.

SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyebutkan KUHP yang masih menyisakan berbagai pasal bermasalah, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, menjadi faktor kuat di balik menurunnya skor pada indikator ini. Pasal tentang penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara, penghinaan kepada Presiden, demonstrasi yang mengganggu kepentingan umum, hingga pidana bagi penyebar berita yang dianggap bohong yang mengakibatkan kerusuhan, merupakan pasal-pasal karet dalam KUHP yang sangat rentan memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan pers.

"Bahkan PBB Indonesia turut menegaskan keprihatinan adopsi ketentuan tertentu dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM, termasuk di antaranya kebebasan berekspresi dan berpendapat, bahkan berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani dalam keterangan yang dikutip dalam ringkasan eksekutif "Pemajuan Tanpa Keadilan (?) Indeks Kinerja HAM 2022, dikutip dari tempo.co, Minggu (11/12/2022).

SETARA Institute dan INFID memperhatikan fakta di lapangan sebelum KUHP disahkan, seperti pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan BBM di banyak daerah, represifitas aparat terhadap aktivis dan mahasiswa dalam KTT G20 di Bali, pembatasan diskusi publik dengan dalih kepentingan umum, hingga pemboikotan sejumlah peneliti asing oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kajian riset mengenai populasi orangutan di Indonesia yang terjadi, menjadi bukti rapuhnya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara demokrasi ini.

Fakta-fakta ini pun berkontribusi pada memburuknya skor indikator Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat dalam Indeks Kinerja HAM 2022. Dalam penelitian SETARA Institute dan INFID, Hak Sipil dan Politik atau Hak Sipil di Indonesia mengalami penurunan skor 0,1 menjadi 3,1 dalam Indeks Kinerja HAM 2022.

SETARA Institute dan INFID

mengatakan skor 3,1 Hak Sipil ini jauh dari kata membaik. Pasalnya, variabel Hak Sipil mengalami kecenderungan mencatat skor buruk setiap tahunnya. SETARA Institute dan INFID menilai upaya perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat masih jauh dari harapan. Adapun skor rata-rata nasional adalah 3,3.

"Alih-alih beranjak lebih baik, skor pada indikator ini justru mengalami regresi sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya dan selalu menjadi indikator penyumbang skor terendah pada Indeks Kinerja HAM tiap tahunnya," kata Ismail Hasani.

Pengukuran diberikan terhadap 6 indikator Hak Sipil dan 5 indikator Hak Ekosob serta 19 indikator untuk Isu HAM Khusus yang terdiri dari 6 indikator isu HAM Papua dan 13 indikator untuk isu kelompok minoritas. Nilai dari setiap indikator berasal dari rata-rata nilai seluruh sub-indikator dalam satu indikator. Adapun basis pengukuran dan pengumpulan data berasal dari berbagai sumber dan proses di antaranya berasal dari dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, laporan media dan laporan berbagai lembaga yang relevan maupun respons terhadap peristiwa-peristiwa penting terkait HAM yang kemudian diolah menjadi narasi penegakan HAM.

Dalam indeks ini, skala pengukuran ditetapkan dengan rentang nilai 1-7, di mana angka 1 menunjukkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk dan angka 7 menunjukkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling baik.

Adapun enam subindikator Hak Sipil antara lain hak hidup, kebebasan beragama dan keyakinan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Kebebasan Berekspresi Sumbang Skor Terkecil

Dari enam subindikator tersebut, kebebasan berekspresi dan berpendapat menyumbang skor terkecil dengan 1,5. Sementara hak hidup dan hak atas rasa aman pada skor sama 3,3. Kemudian hak memperoleh keadilan pada skor 3,6. Lalu yang tertinggi adalah kebebasan beragama dan keyakinan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Kedua subindikator tersebut berada pada skor 3,7.

Selain indikator Hak Sipil, skor terendah juga terjadi pada indikator Isu HAM Khusus dengan skor 2,5. Isu HAM Papua juga belum mengalami kemajuan dengan subindikator yang bahkan tidak menyentuh skor 2,5.

Adapun peningkatan skor pada Indeks Kinerja HAM 2022 ini



Aksi buruh menolak di Patung Kuda Jakarta KUHP

disumbang oleh indikator-indikator pada variabel Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau Hak Ekosob, terutama hak atas pendidikan sebagai penyumbang skor terbesar pada variabel tersebut. Meski demikian, angka 4,4 pada indikator hak atas pendidikan ini sebetulnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan skor pada Indeks Kinerja HAM 2020, yaitu pada angka 4,6.

Berdasarkan Indeks Kinerja HAM 2022 ini, SETARA Institute dan INFID meminta Presiden Joko Widodo kembali meneguhkan kembali janji politiknya dalam pemajuan HAM di sisa dua tahun kepemimpinannya. Presiden Jokowi bisa melakukan ini dengan memperkuat politik kemajuan HAM melalui pengarusutamaan program-program yang terukur dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap nilai-nilai HAM.

Adapun dalam hal legislasi, SETARA Institute dan INFID mendesak Pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam KUHP dengan proses yang lebih memperhatikan 'meaningful participation'.

Kala Buruh Turut Beraksi Tolak KUHP

Biasanya, buruh turun ke jalan untuk menyuarakan kenaikan upah atau isu lain yang berkaitan langsung dengan kehidupan buruh. Namun, Sabtu (10/12/2022) lalu, buruh juga berunjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang baru saja disahkan DPR bersama pemerintah.

Elemen Buruh Suarakan Tolak KUHP Aksi itu diikuti oleh sejumlah organisasi massa buruh seperti KSPI, ORI KSPSI, KPBI, KSBISI, SPI, Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda/mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain. Presiden

Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal mengatakan, penolakan terhadap KUHP dilakukan karena substansi aturan terbaru itu menempatkan warga negara sebagai penjahat.

"Pendekatan warga negara ditempatkan sebagai tanda petik penjahat. Jadi apa pun yang dilakukan warga negara, UU KUHP menempatkan warga negara sebagai kejahatan," kata Iqbal.

Selain penolakan terhadap KUHP, ada beberapa hal yang mereka suarakan dalam demonstrasi tersebut. Beberapa diantaranya yakni menolak omnibus law UU Cipta Kerja, Land Reform - Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, menuntut disahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), meminta usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah di rekomendasikan oleh komnas HAM, dan menolak upah murah.

Dari beberapa pasal dalam KUHP yang dianggap oleh massa buruh mencederai demokrasi, pasal penghinaan presiden dianggap paling bermasalah. Di Pasal 349 ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara.

Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Menurut dia, isi pasal dalam KUHP itu telah menghilangkan sisi kemanusiaan presiden. "Presiden adalah seorang manusia, di situlah presiden RI dari partai mana pun dia, diuji ketika menjadi presiden, apa dia tidak boleh dikritik oleh warga negara?" tegas dia.

Said pun menyebut, apabila ada seseorang yang dihukum lantaran "menghina" presiden, maka harus dilihat seperti apa konteksnya. Harus ada batasan yang jelas apakah orang itu memang menghina atau mengkritik kebijakan yang diambil oleh Kepala Negara. (lut/dya)



SOSOK ERINA GUDONO

Menantu Presiden Jokowi

Foto - Foto : Berbagai Sumber

ERINA Gudono kini menjadi sorotan publik, karena akan menjadi menantu presiden Jokowi.

Erina akan menjalani pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang diadakan di Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah besok 10 Desember 2022.

Sebelum dikenal sebagai calon mantu Presiden, Erina Gudono memang dikenal sebagai finalis Puteri Indonesia 2022. Tak hanya itu saja, publik juga mengulik sosok Erina yang ternyata lahir dari keluarga akademisi.

Lantas, siapa sebenarnya sosok dari Erina Gudono ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Anak Profesor

Erina Gudono lahir pada 11 Desember 1996 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, di mana kedua orang tuanya adalah sosok akademisi.

Berdasarkan situs Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang menyebutkan bahwa Profesor Dr. Mohammad Gudono, MBA, Aks, Ph.D (Alm), sosok mendingang sang ayah adalah dosen FEB UGM pada Departemen Akuntansi.

Semasa hidupnya, Profesor Gudono yang telah meninggal dunia sejak Jumat, 22 Juli 2016 mencatatkan beberapa prestasi kerja yang gemilang, di antaranya Satya Lancana Karya Satya XX dari Presiden RI pada 2013 dan Satya Lancana Kesetiaan 25 tahun dari UGM pada 2013.

Sementara, sang ibu yakni Sofiatun Gudono, M. Si, Aks merupakan seorang dosen, Menurut biodata yang tercantum di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ibu Erina saat ini, ibunda Erina menjabat sebagai dosen sekaligus rektor dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mitra Indonesia.

Sebagai akademisi, calon mertua Kaesang Pangarep ini juga memiliki bisnis batik. Menilik akun Facebook resmi Sohpie Boutique, bisnis tersebut sudah sering mengikuti berbagai pameran ke luar negeri. Salah satunya, pameran East West Economic Corridor (EWEC) di Vietnam dan Indonesia Expo di Bangladesh.

Perjalanan karier Erina Sofia Gudono

Erina lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, pada 11 Desember 1996.

Erina Gudono merupakan finalis Putri Indonesia 2022 mewakili DI Yogyakarta. Dia berhasil menembus sampai 11 besar.

Dia pernah menempuh pendidikan di UGM dengan program studi Administrasi Bisnis dan Manajemen. Setelahnya, Erina kembali mengejar gelar S2 di Universitas Colombia dengan jurusan Administrasi Publik.

Melansir dari LinkedIn, selama kuliah, dirinya dikenal sebagai mahasiswa berprestasi, di mana Erina menjadi mahasiswi bisnis lulusan terbaik dengan menerima lebih dari 15 penghargaan global dan nasional selama kuliah.

Tak hanya itu, pada tahun 2019 hingga 2020, dirinya pun ditunjuk sebagai Duta Pariwisata Cerdas

Indonesia.

Kesuksesan di bidang akademik, menjadikan Erina turut meraih kesuksesan di dunia kerja, terbukti dengan kesuksesannya mengawali karier di bidang brand management di sebuah perusahaan multinasional.

Erina memulai kariernya secara profesional pada 2020 di Bank Indonesia sebagai Project at Payment System Policy Department dan Assistant Manager Apprenticeship. Dia bekerja di BI sejak April 2019 hingga Juli 2021.

Saat ini, dia bekerja di JP Morgan sebagai Asia analyst, perusahaan yang

bergerak di bidang keuangan.

Dia juga sempat menjalankan berbagai macam peran di bidang e-commerce.

Selain memiliki karier sebagai analis keuangan, Erina Gudono juga kerap membagikan aktivitasnya sebagai finalis Puteri Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahkan dengan followers Instagram lebih dari 115.000 pengikut, tak heran jika Erina sering bekerja sama untuk mempromosikan banyak brand dengan melakukan endorsement (Bisnis)



**KAESANG
&
ERINA**



MASUK ANGIN, PENYEBAB DAN CARA MENCEGAHNYA



ISTILAH masuk angin adalah hal yang umum disebut orang Indonesia. Gejala masuk angin ini hampir serupa dengan influenza karena termasuk ke dalam jenis penyakit ISPA.

Masuk angin merupakan istilah yang dikenal oleh orang awam ketika kondisi tubuh sedang tidak enak

badan, seperti pusing, mual, demam, hidung tersumbat, dan lain sebagainya.

Munculnya istilah masuk angin dikarenakan beberapa orang mempercayai kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya udara atau angin yang masuk ke dalam tubuh, terutama saat musim pancaroba.

Informasi ini tidak benar. Faktanya, daya tahan tubuh mudah menurun terlebih saat musim pancaroba.

Ketika musim pancaroba, suhu udara cenderung mudah berubah-ubah.

Perubahan suhu udara ini akan membuat tubuh terus menyesuaikan diri sehingga dapat berdampak pada daya tahan tubuh.

Selain itu, musim pancaroba membuat intensitas sinar matahari di pagi hari yang membantu proses sintesis vitamin D dalam tubuh ikut menurun.

Padahal, vitamin D ini menjadi nutrisi yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh.

Dengan menurunnya daya tahan tubuh, seseorang akan rentan terserang penyakit, salah satunya yaitu common cold yang menyerupai gejala masuk angin.

GEJALA MASUK ANGIN

Biasanya, gejala masuk angin yang

timbul cenderung tidak serius.

Ada beberapa tanda atau gejala masuk angin yang cukup umum terjadi pada penderitanya. Beberapa gejala masuk angin adalah sebagai berikut:

- Pusing atau sakit kepala
- Demam
- Perut kembung
- Mual dan muntah
- Radang tenggorokan
- Pilek dan batuk
- Hidung tersumbat
- Lemas
- Nyeri otot dan sendi
- Diare
- Cenderung sering buang gas, seperti bersendawa atau kentut

CARA MENGATASI MASUK ANGIN

Masuk angin merupakan masalah kesehatan yang umumnya tidak berpotensi menimbulkan komplikasi penyakit lain serta dapat sembuh dengan sendirinya.

Karena itu, seseorang yang mengalami masuk angin dapat memulihkan kondisi tubuhnya secara mandiri.

Untuk mengatasi gejala masuk angin, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Beberapa cara mengatasi masuk angin tersebut di antaranya:

Mengonsumsi makanan dan minuman hangat, seperti sup, teh hangat, dan lain sebagainya.

● Istirahat yang cukup, yaitu lama waktu tidur sekitar 7-8 jam/hari.

● Mencukupi kebutuhan cairan tubuh.

● Menggunakan pakaian hangat untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil.

● Apabila setelah melakukan beberapa cara di atas dan gejala masuk angin tidak kunjung mereda, Anda dapat segera berkonsultasi dengan dokter.

CARA MENCEGAH MASUK ANGIN

Daya tahan tubuh menjadi faktor utama yang harus dijaga untuk mencegah terjadinya masuk angin, terutama ketika sedang musim pancaroba.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah masuk angin antara lain:

- Minum air putih yang cukup. Setidaknya, 2 liter sehari.
- Mengonsumsi makanan yang sesuai dengan pesan gizi seimbang
- Makan tepat waktu
- Berolahraga secara rutin
- Istirahat yang cukup, setidaknya 7 sampai 8 jam sehari.
- Senantiasa mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah makan
- Menggunakan masker ketika sedang keluar ruangan (Bisnis)



PASAR PONSEL PADA 2023 DIPREDIKSI TUMBUH TIPIS



COUNTERPOINT Market Outlook Service memprediksi pasar ponsel global hanya akan tumbuh tipis sebesar 2 persen pada 2023.

Counterpoint bahkan sempat melakukan revisi angka pertumbuhan dari yang semula sebanyak 6 persen.

Hal ini dilakukan usai mempertimbangkan adanya ekonomi makro dan pelemahan konsumsi yang berdampak pada bisnis ponsel.

Wakil Presiden Counterpoint Research Peter Richardson menjelaskan penyebab lain pelemahan pasar ponsel antara lain inflasi yang terus-menerus, ekspektasi kenaikan suku bunga di masa depan, dan pendapatan perusahaan yang memburuk.

Selain itu, ekonomi China yang terhenti, perang Ukraina-Rusia yang berlarut-larut, gejolak politik di Eropa, dan serangkaian kontrol ekspor baru di Cina dari AS dinilai berkontribusi

pada perkiraan pasar ponsel ke depannya.

Dia juga memperkirakan kinerja buruk penjualan ponsel global bakal terus berlanjut sampai semester I/2023 dan baru ada pertumbuhan pada kuartal III/2023.

Produsen peralatan asli (original equipment manufacturer/OEM) yang saat ini berfokus pada segmen premium dinilai akan lebih resisten dibandingkan ponsel kelas bawah hingga menengah.

Penjualan ponsel pada 2019 (pre covid 19) mencapai 1.479 juta unit, pada 2020 (Covid-19) mencapai 1.331 juta unit, 2021 (masa pemulihan) mencapai 1.391 juta unit dan pada tahun ini diprediksikan akan mencapai 1.240 unit.

Pada 2023, penjualan ponsel diprediksikan akan mencapai 1.262 juta unit dengan adanya tantangan yang terjadi secara global.

Menariknya, Counterpoint memprediksi pada 2024 pasar global untuk perangkat 5G diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang sehat karena upaya untuk menyebarkan perangkat 5G dengan harga rendah dan menengah terus berlanjut.

Hal ini juga didorong dengan operator secara aktif mempromosikan

5G, dan insentifnya cukup di banyak pasar untuk membuat konsumen beralih ke teknologi baru.

Faktor bentuk baru, seperti ponsel foldable, juga akan mendorong pertumbuhan smartphone premium.

Dengan lebih banyak ponsel OEM memasuki segmen yang dapat dilipat, pasar akan melihat harga ponsel ini stabil dan segmen yang dapat dilipat tumbuh menjadi lebih menonjol seiring dengan segmen 5 (Bisnis)



TIPS BELANJA MURAH DAN AMAN SAAT HARBOLNAS 12.12



SALAH satu kesempatan emas untuk bisa memborong belanjaan secara online tapi hemat adalah saat Hari Belanja Online Nasional alias Harbolnas yang identik dengan 12.12 karena jatuh pada 12 Desember.

Berbagai situs e-commerce di Indonesia bakal memberikan promo diskon besar-besaran selama periode ini.

Namun dibalik kemeriahannya yang menawarkan beragam produk dengan diskon besar.

Ada sejumlah tips yang perlu diterapkan agar tidak mudah tergiur sampai membuat Anda membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan atau bahkan tertipu dengan berbagai potongan menggoda saat Harbolnas. Simak ulasannya.

1. Hindari diskon tidak masuk akal

Jika Anda membutuhkan produk populer yang dijual di banyak pasar, Anda dapat memeriksa harganya di beberapa sumber web. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan tawaran harga terbaik.

Namun, pada saat yang sama, Anda juga tidak boleh tergiur dengan harga yang terlihat terlalu rendah untuk menghindari penipuan.

2. Tinggalkan toko jika minta data pribadi Anda

Semua situs terkemuka harus

memposting kebijakan privasi yang menjelaskan apa yang mereka lakukan dengan informasi pelanggan. Luangkan beberapa menit untuk meninjaunya. Jangan berikan informasi yang tidak perlu dengan mengisi kolom opsional di formulir pemesanan, misalnya nomor KTP, foto KK, dan nomor rekening. Karena, beberapa situs menjual data kepada pihak ketiga.

3. Perhatikan mekanisme kiriman barang

Sebelum menyelesaikan proses pembelian di e-commerce, pastikan metode pengiriman yang dipilih sesuai dengan kehendak dan dana yang Anda miliki. Jika kita memilih pengiriman instan macam Same Day, misalnya, maka barang bisa sampai dalam hitungan jam.

4. Simpan resi

Setelah Anda melakukan pesanan, Anda akan mendapatkan layar dengan detail transaksi. Simpan resi tersebut untuk mengetahui seperti apa status pesanan Anda.

5. Apa kebutuhan Anda

Tidak ada gunanya membeli 10 koleksi sepatu yang serupa meskipun itu indah. Idealnya, Anda harus memutuskan apa yang Anda butuhkan sebelum berbelanja agar uang Anda

tidak habis dengan sia-sia.

6. Baca review toko

Ulasan menjadi cara cerdas untuk Anda dapat mempelajari tentang masalah kualitas, menemukan kiat memilih ukuran yang tepat, melihat foto sebenarnya agar produk yang diterima sesuai dengan ekspektasi.

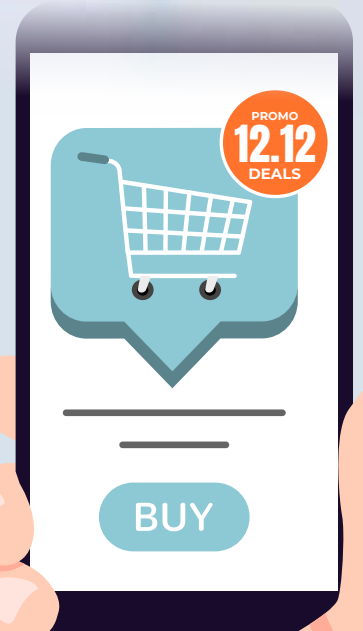
7. Ingat, tren baru akan segera memudar

Banyak retail memang sengaja mempromosikan barang-barang trendi untuk membuat orang terus mengejar koleksi baru. Tapi Anda harus jangan mudah tergiur dengan penawaran mereka.

Fesyen akan berubah mengikuti tiap musim, dan jika Anda terus mengikutinya, itu tidak akan pernah ada habisnya. Maka, belilah pakaian atau barang yang memang berkualitas dengan pertimbangan yang lebih bijak.

8. Cari kupon diskon dan voucher

Pada momen Harbolnas ini masing-masing e-commerce dan toko online pastinya menerapkan syarat serta ketentuan pada promo. Meskipun disebutkan banyak promo dan diskon, namun itu berlaku hanya untuk produk tertentu saja. Di sinilah pentingnya kamu mengetahui dengan baik persyaratan juga ketentuan pada promo tersebut (Bisnis)



13 Zona Megathrust(dari hal 1)

KEPALA Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan tren gempa dan gempa merusak tersebut saat mengumumkan temuan zonasi patahan atau sesar Cugenang penyebab gempa M5,6 di Cianjur dan ratusan gempa susulannya sejak 21 November 2022. Seperti diketahui gempa Cianjur itu sangat merusak dan menyebabkan lebih dari 300 orang meninggal.

"Kalau dulu tiap tahun terjadi 8-10 kali gempa merusak, sekarang, sejak 2018, bisa terjadi 15-20 kali dalam setahun," kata Daryono dikutip Minggu (11/12/2022).

Daryono menuturkan, peningkatan tren aktivitas kegempaan dicatat BMKG sejak 2013 dan sempat memuncak pada 2018 yang mencatat lebih dari 11 ribu gempa dalam setahun. Padahal, dia membandingkan, rata-rata aktivitas gempa tahunan sebelumnya sekitar 5.500 kali.

BMKG, kata Daryono, telah memastikan peningkatan jumlah gempa tak terhubung dengan peningkatan jumlah sensor seismik yang disebar di banyak wilayah. Hasil analisis yang dilakukan mendapati tingginya jumlah gempa pada 2018 disumbang jumlah gempa susulan dari gempa Lombok dan Palu.

Tapi, ternyata, tren masih berlanjut selepas dua gempa itu. Sepanjang 2020, catatan BMKG menunjukkan jumlah gempa bahkan lebih dari 12 ribu kali. Sempat turun lagi pada 2021, trennya meninggi kembali pada 2022 ini yang telah mencapai 11 ribu kali per Daryono memberikan keterangannya pada Kamis lalu.

Jumlah gempa sepanjang tahun ini masih mungkin bertambah jika melihat beberapa gempa belakangan, seperti gempa Cianjur, diikuti gempa susulan dalam jumlah besar. "Ini adalah data riil yang perlu kami sampaikan, perlu lebih banyak mitigasi, termasuk antisipasi bangunan yang lebih kuat untuk mengurangi risiko," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Daryono juga menjelaskan tingkat kerawanan gempa di Jawa Barat. Seperti diketahui, setelah gempa merusak di Cianjur pada 21 November lalu, terjadi rentetan gempa darat lainnya di wilayah Jawa Barat seperti di Garut, Tasikmalaya dan Sukabumi

Daryono menerangkan Jawa Barat dan Pulau Jawa pada umumnya adalah kawasan seismik yang aktif dan kompleks. "Banyak sekali sumber gempa," katanya.

Dia merujuk mulai dari zona outerise di sebelah selatan zona subduksi, lalu zona megathrust, zona benioff penghasil gempa intraslab sampai zona retakan atau rekahan penyebab gempa intraplate. Itu belum termasuk gempa kerak dangkal seperti yang terjadi di Cianjur 21 November.

Catatan tersendiri diberikan Daryono untuk gempa intraslab seperti yang mengguncang Garut (M6,1) dan Sukabumi (M5,8) belum lama ini. Gempa dari kedalaman di bawah zona megathrust ini-patahan yang terjadi karena lempeng Australia

yang terus menghujam di bawah Pulau Jawa - - berpotensi menimbulkan guncangan yang sangat kuat.

"Guncangan atau ground motion lebih kuat daripada gempa-gempa magnitudo sekelasnya dari sumber lain, dari zona megathrust sekalipun," katanya sambil menambahkan gempa intraslab paling merusak dicatat terjadi pada 2009 di Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Sedang gempa di Garut dan Sukabumi disyukuri Daryono berasal dari kedalaman di atas 100 kilometer sehingga tidak memberi dampak guncangan kuat. "Juga tidak menimbulkan tsunami karena tidak mampu mengganggu kolom permukaan air laut."

Sebelumnya, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Iman Fatchurochman mengatakan, BMKG telah berupaya untuk memitigasi meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan dampak dari kerusakan yang akan ditimbulkan dari bencana yang terjadi.

"BMKG juga telah membahas, serta menyodorkan peta rawan bencana dengan mengajak keterlibatan pemerintah daerah untuk memitigasinya. Wilayah Indonesia itu ada 13 zona megathrust, serta 295 sesar aktif yang harus diwaspadai," kata Iman.

Menurutnya, gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas mendatangkan kerusakan parah dan banyak menelan korban jiwa. Hal ini terjadi karena bangunan rumah tidak tahan gempa, serta gempa sering kali terjadi di batuan lunak. "Korban meninggal pada umumnya, disebabkan karena bangunan rumahnya sendiri, bukan karena gempanya sendiri," ujar Iman.

BMKG, lanjut dia, sudah menyediakan data daerah rawan gempa sejak 2017 dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)). "BMKG telah berkontribusi untuk tata ruang, serta berkoordinasi dengan BNPB, serta Kementerian PUPR dalam memberikan informasi potensi kebencanaan," katanya.

Kementerian PUPR: Tak Boleh Ada Hunian

Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur agar daerah rawan bencana di sepanjang jalur sesar atau patahan geser aktif Cimandiri menjadi area non-hunian. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi

FOTO UDARA ZONA BAHAYA PATAHAN AKTIF CUGENANG



terjadinya kerusakan rumah dan adanya korban jiwa jika terjadi bencana.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan mulai tingkat rusak ringan, sedang hingga berat pasca-gempa Cianjur. Hal ini membuat ribuan warga harus mengungsi ke daerah yang aman untuk sementara waktu.

Sementara itu, berdasarkan peta BMKG diperoleh informasi dan hasil foto udara zona bahaya patahan aktif atau sesar Cimandiri memiliki panjang sekitar 9 kilometer dan membentang melewati sembilan desa, mulai dari Desa Ciharang hingga Desa Nagrak.

"Jadi sekitar 300 hingga 500 meter jalur sesar Cimandiri tersebut sebetulnya mungkin menjadi area non hunian seperti jalur hijau, pertanian maupun ruang terbuka hijau," kata Iwan dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/12/2022).

Oleh karena itu, Kementerian PUPR meminta agar pemerintah daerah (Pemda) bisa lebih tegas dan mengkoordinir warga agar tidak kembali ke hunian yang lama. Sebab, Kementerian PUPR telah menyiapkan rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA) untuk relokasi hunian warga di lahan yang sudah disiapkan Pemda di Desa Sirnagalih, Kecamatan Ciluku yang lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyiapkan rumah tahan gempa untuk relokasi warga terdampak bencana tipe 36 dan memiliki lahan 75 meter persegi. Rencananya, rumah tahan gempa tersebut dibangun sebanyak 200 unit dan terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama ditargetkan selesai pada akhir Desember 2022 dan tahap kedua pada pekan ketiga Januari 2023 mendatang.

"Pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Ketika warga direlokasi maka mereka akan

mendapatkan ganti rugi rumah tahan gempa tipe 36 beserta lahannya. Jadi, lahan yang di lokasi rawan harus dikuasai Pemda sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membangun rumah di tempat lama," katanya.

"Kami berharap Pemkab Cianjur bisa segera menetapkan kawasan yang siap bangun sehingga bisa dibangun rumah tahan gempa untuk masyarakat," ujarnya.

Menurut Iwan, titik lahan relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas wilayah sehingga lebih tahu lokasi serta tata ruang wilayah yang bisa digunakan untuk hunian. Nantinya, Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi dengan BNPB, Badan Geologi dan BMKG untuk melihat alternatif lokasi yang dipersiapkan.

"Jadi kami akan mengecek terlebih dahulu apakah lokasi tersebut aman dan layak untuk dibangun bangunan untuk hunian maupun infrastruktur dasar pendukung lainnya. Beberapa contoh pembangunan hunian pasca bencana ada di Palu, Sulawesi Tengah dan Lumajang, Jawa Timur sehingga masyarakat bisa segera memiliki hunian tetap dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)," katanya.

Iwan juga menjelaskan konsep pembangunan rumah yang diusung kementerian PUPR yaitu membangun dengan lebih baik dalam penyediaan hunian pasca bencana. Menurutnya, proses penanganan bencana tidak boleh terlalu lama. Hal ini supaya masyarakat tidak tinggal di hunian sementara yang tidak layak huni dalam jangka waktu yang lama.

"Kami juga sudah melakukan survey dan identifikasi rumah masyarakat yang rusak dengan aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena) sehingga dapat diketahui kira-kira berapa rumah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kami juga akan melihat alternatif lahan Pemda dan berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat apakah lokasi yang disiapkan nanti bisa memungkinkan dibangun bangunan atau tidak," terangnya. (wid,ist,rls,ant/dya)

Sekjen PBB Kritisi KUHP Baru Bakal Dipanggil, Akademisi Asing Dikabarkan Ikut Khawatir



(Ilustrasi) KUHP yang baru disahkan memicu polemik mosialisasi diharapkan segera dilakukan, termasuk pemerintah diminta mendengarkan tuntutan rakyat. (Foto-dok)

JAKARTA - Berbagai kekhawatiran makin mencuat terkait dampak dari disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Di satu sisi banyak yang merasa KUHP baru akan merugikan, sementara pemerintah keukeuh produk pembaruan dari peninggalan penjajah tersebut akan membawa kebaikan.

Terbaru, Kementerian Luar Negeri dikabarkan akan memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), buntut pernyataan organisasi tersebut atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Sejumlah kekhawatiran disampaikan PBB dalam pernyataan terbarunya atas KUHP, yang mereka nilai tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia.

"Kementerian Luar Negeri benar akan panggil," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Minggu (11/12/2022).

Pernyataan PBB tersebut dirilis dalam laman resmi indonesia.un.org berjudul Statement on the new Indonesian Criminal Code. Kendati demikian, Faizasyah tidak merinci apakah pernyataan ini yang jadi dirujuk Kementerian Luar Negeri untuk memanggil perwakilan PBB. "Mengenai kebenaran isi pernyataan tersebut, silahkan ditanyakan ke mereka (perwakilan PBB)," kata dia.

Dalam pernyataan ini, perwakilan PBB menyampaikan kekhawatirannya atas KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR. PBB dalam pernyataan tersebut menyampaikan kekhawatirannya atas RKUHP, salah satunya karena beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi kerja jurnalistik dan melanggar kebebasan pers.

"Orang lain akan mendiskriminasi, atau memiliki dampak diskriminatif pada, perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan minoritas seksual,

dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender," kata PBB dalam pernyataan yang dirilis 8 Desember tersebut.

Pasal lainnya berisiko "melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial negatif terhadap anggota agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka".

Lantas, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritisi pernyataan PBB tersebut. Dia menilai, ada tiga masalah dalam pernyataan tersebut. Pertama, pernyataan resmi PBB hanya boleh dikeluarkan orang organ-organ utama mereka.

"Seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan HAM, Sekjen PBB, dan organ-organ tambahan. Sama sekali bukan suara dari pejabat Perwakilan PBB di Indonesia," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

Dia tak yakin pernyataan terkait KUHP merupakan pandangan resmi dari organ-organ utama atau tambahan PBB. Kedua, Hikmahanto juga meragukan pernyataan itu sudah melalui kajian dari organ utama dan tambahan PBB.

"Seperti misalnya ada special rapporteur [pelapor khusus] yang mendapat mandat dari Organ Utama," ujar pria yang juga Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.

Ketiga, Hikmahanto mengungkapkan pernyataan terkait KUHP baru itu juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, yang mengatur bahwa PBB tak punya kewenangan campur tangan dalam masalah yurisdiksi domestik setiap negara.

Oleh sebab itu, dia menyarankan Kementerian Luar Negeri memanggil Kepala Perwakilan PBB di Indonesia untuk dimintai keterangannya.

Bahkan, bila perlu, dia diusir dari Indonesia. "Jangan sampai individu yang menduduki jabatan di Perwakilan PBB Indonesia yang sebenarnya petualang politik mencederai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam PBB," kata Hikmahanto.

German Ikut Bereaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, mendapatkan informasi Jerman bakal menarik akademisinya di Indonesia buntut KUHP disahkan. Kemendikbudristek mengaku belum mendengar tentang informasi itu. "Saya belum mendengar informasi tersebut," ujar Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam.

Nizam lalu berkomentar mengenai KUHP yang disorot sejumlah pihak, termasuk internasional. Nizam menyebut KUHP untuk melindungi masyarakat. "Hemat saya UU tersebut lahir untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat. Mestinya tidak perlu dirisaukan kalau kita tidak melakukan kesalahan atau kejahatan," ujar Nizam.

Sebelumnya, Dede Yusuf menceritakan pengalamannya bertemu dengan delegasi Jerman. Ia menyebut Jerman khawatir dengan aturan KUHP baru yang telah disahkan. "Saya kemarin juga menerima delegasi dari parlemen Jerman yang juga menyatakan mungkin akan menarik mahasiswa mereka ataupun wisatawan mereka, akademisi, yang bekerja di Indonesia untuk negara lain," ujar Dede.

Dede menyebut 4 hari yang lalu, ia menerima kunjungan ketua parlemen pendimken Jerman. Saat itu, ketua parlemen pendidikan Jerman terangnya menyatakan kekhawatirannya soal KUHP baru. "Mereka juga bilang kami punya mahasiswa, punya akademisi, yang bertugas di sini tentu mereka tidak nyaman dengan undang undang ini

dan sebagainya, mungkin kita (Jerman) akan berpikir untuk memindahkannya ke negara lain," jelas Dede.

Dede tak mempermasalahkan terkait 'ancaman' Jerman itu. Ia menyebut permasalahan dari polemik ini yaitu belum masifnya sosialisasi KUHP. "Itu kan hak mereka (menarik akademisi), cuma kan ini karena belum tersosialisasikan dengan baik. Inilah tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi karena ada delik aduan tadi," tutur Dede. (wid,rls,ant,ist/dya)

DAMPAK DARI KUHP BARU MULAI TERASA

ANCAMAN BAGI DUNIA PERS

Mugni Ilma, jurnalis media online asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami intimidasi verbal dan diancam pidana menggunakan KUHP oleh perwira di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Penyebabnya, Mugni dituduh mencemarkan nama baik karena menulis berita dugaan fee yang mengalir ke personel tim penyidik Ditreskrimsus yang sedang menangani kasus kosmetik ilegal. Padahal menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, berita yang ditulis Mugni dipastikan sudah memenuhi unsur fakta dan kaidah jurnalistik tentang asas keberimbangan.

DUNIA HIBURAN BISA DIPIDANA

Pengacara kondang sekaligus pemilik klub malam, Hotman Paris misalnya, memprotes Pasal 424 UU KUHP tentang minumas keras. Menurut dia, aturan tersebut dapat membuat waiters hingga turis asing yang menunggang miras kepada seseorang terancam masuk penjara. Hotman menjelaskan dalam KUHP itu disebutkan pihak yang menambahkan minuman keras kepada seseorang hingga orang tersebut mabuk, maka dapat dipidana penjara hingga 1 tahun. "Jadi orang yang dalam rangka pekerjaan pun masuk penjara, waiters misalnya. Jadi misalnya ada tamu sudah tipsy, lalu dia panggil waiters untuk minta tambah minuman, dia bisa masuk penjara. Di sini juga tidak disebutkan pengertian mabuknya seperti apa," kata Hotman.

SIDE BUSINESS KALAPAS

Lebih lanjut, Hotman juga menyebut jabatan Kepala Lembaga Permasalahankorupsi bakal sangat "basah" pasca disahkannya KUHP yang baru. Penyebabnya, dalam Pasal 98 sampai 102 KUHP yang baru mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika setelah masa percobaan selesai dan pelaku berkelakuan baik, maka hukuman mati dapat dianulir. "Berarti apa? Kalapas yang akan mengeluarkan surat berkelakuan baik bakal jadi tempat yang sangat basah. Siapa yang tidak mau bayar berapapun dari pada ditembak hukuman mati, side business," kata Hotman.

SOAL PASAL KORUPSI

Direktur Akademi Anti Korupsi yang juga tergabung dalam IM57+ Institute, Budi Agung Nugroho menyoroti penerapan beberapa pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke dalam Pasal 622 KUHP dan Pasal 79 KUHP yang baru. Pasal tersebut antara lain Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 11 UU Tipikor. Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, masuknya Pasal UU Tipikor dalam UU KUHP yang baru tidak serta merta membuat penegakan hukum terhadap korupsi menjadi lebih kuat. Sebab, Budi menyebut beberapa Pasal itu hanya di-copy paste dari UU Tipikor ke UU KUHP.

Bahkan, Budi menyebut pada KUHP terjadi pemyederhanaan jenis korupsi. Jika pada UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 jenis korupsi terbagi menjadi 7 jenis korupsi, yang tersebar pada 32 pasal hanya diabsorb menjadi 2 jenis korupsi yakni korupsi merugikan keuangan negara dan suap. Lalu untuk Pasal 79 KUHP, Budi menyebut hanya terjadi penyeragaman denda untuk pelaku korupsi. Besarannya mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp50 miliar. Besarannya pidana denda dapat diubah jika terjadi perubahan nilai uang melalui Peraturan Pemerintah.